

PELUANG JEPANG UNTUK MENJADI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB

Oleh :

Erna Kurniawatiernahpw@yahoo.com**Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN ‘Veteran’ Yogyakarta
Jl. Babarsari No.2, Tambakbayan, Yogyakarta****Abstract**

Nowadays Japan has been known as one of the largest financial contribution to the UN. Moreover, Japan has many times sent its military forces, Self Defence Forces (SDF) for some peace keeping mission under Peace Keeping Operation of the UN, either. In its situation, Japan feels it is really unfair, because Japan has done some important contribution and role for the existence of UN operation, but poorly, Japan is not a member of Security Council Permanent Member with its ‘veto’ privilege yet. So that, Japan asks members of the UN to do some reformation which it means that Japan will be have an chance to be a Security Council Permanent Member . This article will explore what has Japan been done to achieve its ‘dream’ and how its chance will be.

Keywords : Japan, UN Permanent Member , effort, chance**Pendahuluan**

Sejak tahun 1992, tepatnya setelah revisi Undang-Undang *Peace Keeping Operation (PKO)*, secara resmi PM Miyazawa Kiichi untuk pertama kalinya mengungkapkan keinginan Jepang untuk menjadi anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Setelah itu, beberapa kali dan dalam berbagai kesempatan, pemerintah Jepang baik melalui Perdana Menteri maupun melalui Duta Besar Jepang di PBB mengungkapkan keinginan yang sama.

Jepang yang telah bergabung di PBB sejak 1956 telah menjadikan kerjasamanya dengan PBB menjadi pijakan bagi politik luar negeri Jepang. Selain itu, Jepang yang telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia, serta banyak berkontribusi dalam memelihara perdamaian dunia melalui lembaga tersebut, membuat Jepang merasa sudah saatnya untuk siap mengemban tanggungjawab yang lebih besar sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Komitmen Jepang sebagai negara donor terbesar melalui Bantuan resmi Pembangunan (Official Development Assistance / ODA) juga semakin memperkuat argumen Jepang tersebut. Pemerintah Jepang, melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri (Ministry of Foreign Affairs) mengajukan, setidaknya 4

(empat) alasan, sehingga Jepang pantas menjadi anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. (www.mofa.go.jp/policy/un/japan.html)

Pertama, Kerjasama Personil. Sejak tahun 1992, bersamaan dengan diberlakukannya *Peace Cooperation Law*, Jepang telah mengirim kontingen Pasukan Bela Diri Jepang (*Self Defence Forces / SDF*) untuk berperan [sebagai] polisi sipil, pemantau gencatan senjata, dan pemantau Pemilu dalam 6 operasi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, dua operasi bantuan kemanusiaan di *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)*, dan *United Nations Transnational Administration in East Timor (UNTAET)*, dimana keduanya dilakukan pada tahun 1999.

Kedua, Kerjasama Keuangan. Dengan menyediakan sekitar 20,6 % bagi budget PBB, Jepang merupakan pendukung finansial kedua setelah Amerika Serikat dalam berkontribusi terhadap organisasi (PBB). Dengan demikian, kontribusi Jepang telah melampaui (kontribusi) empat anggota Tetap Dewan Keamanan lainnya. Selain itu, kontribusi Jepang juga merupakan sebagian dari Trust Fund yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam pasukan multinasional yang dikirim ke Timor Timur.

Ketiga, Kontrol Persenjataan, Pelucutan Senjata dan Non Proliferasi. Jepang berkomitmen untuk mendorong pelucutan senjata dan non proliferasi internasional, dan dilain pihak tetap mempertahankan *Tiga Prinsip Non Nuklir* Jepang, yaitu untuk tidak memiliki, tidak memproduksi dan tidak mengizinkan negara lain menempatkan senjata nuklir di wilayah Jepang. Sejak tahun 1994, Jepang telah mengajukan draft Resolusi Penghapusan Senjata Nuklir di Majelis Umum PBB, yang kemudian diadopsi dengan dukungan penuh. Jepang juga secara aktif berkontribusi pada suksesnya Konferensi Review 2000 Non Proliferation Treaty (NPT), dan berinisiatif memfasilitasi agar dimasukkan ke dalam Comprehensive Test Ban Nuclear. Disamping itu, Jepang juga telah menjalankan peranan memimpin dalam pelucutan senjata konvensional, termasuk diantaranya senjata ringan (small arms) dan ranjau. Jepang telah menambahkan bantuan finansial untuk mendukung program ini, dan bersama PBB, pada tahun 2000 Jepang membentuk Dana Senjata Ringan.

Keempat, Lainnya, Jepang telah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama enam kali. Selama tahun 1992-1993 misalnya, Jepang secara aktif berkontribusi pada pencapaian perjanjian damai dengan Kamboja. Selama tahun 1997-1998 Jepang juga telah membantu menengahi perdebatan dalam berbagai isu baik isu regional maupun global. (World Bank : 2000)

Upaya-Upaya Jepang

1. Diplomasi Melalui Pidato dalam Forum PBB

Untuk mendapatkan keinginan tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Jepang, diantaranya upaya Diplomasi melalui pidato di berbagai forum PBB. Jepang, melalui forum PBB berupaya meyakinkan ‘dunia’ bahwa keinginannya tersebut semata-mata agar mempermudah upayanya memberi kontribusi lebih besar dalam memelihara perdamaian. Pidato Menteri Luar Negeri Haraguchi Koichi pada era Koizumi antara lain menyatakan :

“ Japan’s position on Security Council Reform, as Prime Minister Koizumi stated in the General Debate, is that in order for the security council to

effectively address its new threats and challenges, countries with the will and resources to play a major role in international peace and security..” (www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=789)

Peran aktif Jepang memang banyak mendapat pengakuan, diantaranya tampak dari pujian dari Sekretaris Jendral PBB waktu itu, Kofi Annan. Dalam pidatonya di depan Parlemen Jepang, Annan mengakui :

..”Today, in an age of interdependence, your role [Japan] is more pivotal than ever...We need Japan to remain involved in the organization’s political, peacekeeping and human rights work. Just ask the people of Tajikistan, Cambodia, East Timor, Mozambique and Rwanda for example, how much they appreciate your efforts to help them emerge from conflict and rebuild stable, functioning states. As consider how much Japan has done for Afghanistan-organizing a successfull pledging conference two years ago here in Tokyo, and I was preveleged to attend that conference and continouing to play a leading role in the country’s reconstruction” (www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=789)

2. Usulan Jepang Terhadap Reformasi Dewan Keamanan

Sejak tahun 1965, yakni ketika keanggotaan Dewan keamanan diperluas dari 11 menjadi 15 anggota, maka sejak itu pula Dewan Keamanan belum melakukan reformasi lagi. Namun, dorongan untuk melakukan reformasi mulai mengemuka kembali sejak tahun 1992. Terdapat 3 (tiga) usulan reformasi Dewan Keamanan, yakni menyangkut keanggotaan, transparansi dan kepemilikan hak veto. Dorongan agar Dewan Keamanan direformasi tampak dari usulan lebih dari 150 negara dalam pertemuan *Millenium Summit* dan *Millenium Assembly* di New York dari 6-22 September 2000.

Salah satu negara yang gencar mengusulkan reformasi di Dewan Keamanan PBB adalah Jepang. Menurut Jepang, Dewan Keamanan harus direformasi karena komposisi Dewan Keamanan saat ini tidak mencerminkan perubahan ekonomi maupun politik yang terjadi pada masyarakat internasional dalam 50 tahun terakhir. Ketika PBB didirikan tahun 1945, atau beberapa saat setelah berakhirnya Perang Dunia II , PBB beranggotakan 50 negara dan

Dewan Keamanan terdiri 11 negara, dengan komposisi 5 anggota tetap dan 6 anggota tidak tetap. Dengan adanya amandemen Piagam pada tahun 1965 terkait dengan semakin banyaknya negara yang bergabung di PBB pada awal 1960an, anggota tidak tetap kemudian ditambah menjadi 10. Sampai dengan bulan Oktober 2000, PBB memiliki anggota 189 anggota, namun jumlah anggota Dewan Keamanan tidak berubah (tetap 15). Selain itu pada awal berdirinya, memang kelima anggota tetap Dewan Keamanan (Permanent 5/ P5) menanggung mayoritas biaya finansial PBB yakni total sebesar 71% (tahun

1946), namun pada saat ini sumbangan mereka semakin menurun.

Dari Tabel 1 berikut tampak kontribusi Jepang untuk belanja reguler Dewan Keamanan (20%) bahkan jauh lebih besar jika dibanding dengan gabungan keempat anggota lain yakni Inggris, Perancis, Uni Sovyet (Rusia) dan Perancis (< 15%). Besarnya kontribusi Jepang juga dapat dilihat pada tabel 1 dimana rata-rata anggota tetap Dewan Keamanan memberi kontribusi yang jauh lebih kecil jika dibanding Jepang yang bukan anggota tetap Dewan Keamanan. Kontribusi China misalnya, bahkan hanya 1% (tabel 1)

Tabel 1
Kontribusi Negara-Negara Besar Untuk PBB (2000)

Amerika Serikat	Jepang	Kanada	Inggris Raya	Italia	Perancis	Jerman	Federasi Rusia	China
20.6%	20%	2.7%	5.1%	5.4%	6.5%	9.9%	1.1%	1.0%

Sumber : The Ministry of Foreign Affairs of Japan, *An Argument for Japan's Becoming Permanent Member*, www.mofa.go.jp/policy/un/japan.html, hal 1-2.

Tabel 2 berikut juga menunjukkan, meskipun secara prosentase komitmen Jepang mengalami penurunan, namun kontribusi Jepang tetap menduduki peringkat kedua terbesar setelah Amerika Serikat.

Tabel 2
Kontribusi Negara-Negara Besar Untuk PBB (2013)

Amerika Serikat	Jepang	Kanada	Inggris Raya	Italia	Perancis	Jerman	Federasi Rusia	China
22.0%	10.83%	2.98%	5.18%	4.45%	5.59%	7.14%	2.44%	5.15%

Sumber : diolah dari *Assesement of Member States' Contribution to the UN Regular Budget of the year 2013 and of New Member States' Advance to the working Capital Fund for the Biennium 2011-2012 and contribution to the UN Regular Budget 2011-2012*, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/866, 24 Desember 2012, hal 2-6.

Ketimpangan kontribusi ini diyakini Jepang dapat berpengaruh terhadap tidak berimbangnya respons Dewan Keamanan terhadap berbagai konflik. Jika Dewan Keamanan ingin tanggungjawabnya menjadi lebih efektif dalam memelihara perdamaian dan keamanan pada abad mendatang, maka kapasitasnya harus diperkuat melalui serangkaian reformasi untuk meningkatkan efektifitas dan legitimasinya. Untuk reformasi PBB, Jepang mengajukan beberapa usulan : 1) untuk memperluas anggota tetapnya dengan menambahnya baik [dari] negara

maju maupun negara Berkembang yang memiliki kemampuan dan kemauan bagi tanggungjawab global memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Jepang siap untuk memikul tanggungjawab lebih besar sebagai anggota Dewan Keamanan yang sudah direformasi.

2) Terkait dengan peningkatan yang pesat anggota PBB, maka menjadi penting pula bagi PBB untuk memperluas anggota tidak tetap; 3) Dalam rangka memelihara keefektifan dan keterwakilan, ukuran yang sesuai bagi perluasan Dewan Keamanan seharusnya 24 anggota, dengan menambahkan 2 dari negara Berkembang dan 3 negara Maju

untuk anggota tetap dan 4 bagi anggota tidak tetap; 4) Dalam memberi jatah perluasan anggota Dewan Keamanan baik tetap maupun tidak tetap bagi kelompok regional, maka harus diputuskan bagaimana memilih anggota tetap dari kelompok tersebut; 5) Terkait dengan [hak] veto, seharusnya tidak ada perbedaan antara anggota tetap lama dan baru. Dalam pandangan Jepang penyelesaian bagi isu ini akan membutuhkan kemauan politis dari seluruh negara; 6) Metode kerja Dewan Keamanan harus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (The Ministry of Foreign Affairs of Japan, *ibid.*)

3. Pembentukan Group of 4 (G4)

Selain pidato di forum PBB dan usulan terhadap Reformasi Dewan Keamanan PBB, Jepang juga berkoalisi dengan negara-negara yang juga 'berminat' menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Brazil, India dan Jerman dengan membentuk Group of 4 (G4). Pada 8 Juli 2005 dengan bertempat di London, Menteri Luar Negeri Brazil Celso Amorim, Wakil Konselor sekaligus Menteri Luar Negeri Jerman Joscha Fischer, Menteri Luar Negeri India Natwar Singh dan Menteri Luar Negeri Jepang Machimura Nobutaka berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, sepakat untuk selain akan mereview perkembangan *African Union Summit* di Syrte, mereka juga sepakat untuk membahas prospek aksi bersama untuk tujuan perluasan dan reformasi Dewan Keamanan. Pertemuan yang menghasilkan *G4 London Declaration* ini antara lain sepakat bahwa kelima negara tersebut tetap berpendirian terhadap perlunya reformasi PBB, khususnya reformasi Dewan Keamanan termasuk perluasan anggota tetap dan tidak tetap DK, dan akan bekerjasama untuk mensukseskannya. (www.mofa.go.jp/policy/un/reform/press0507.html .)

Disamping *G4 London Declaration*, G4 juga mengeluarkan pernyataan bersama yang antara lain disampaikan pada 21 September 2004. Pernyataan bersama pada pertemuan G4 di New York ini berisi 4 poin :1) Bahwa adanya berbagai ancaman pada masyarakat internasional, untuk mengefektifkan (Dewan Keamanan), maka adalah penting untuk mereformasi Dewan Keamanan secara keseluruhan. 2). Sebagai wakil dari anggota, maka Majelis Umum harus direvitalisasi.

Efisiensi agen dan organ PBB juga harus dilakukan untuk menghadapi tantangan yang mendesak. 3) Dewan Keamanan harus merefleksikan realitas komunitas internasional pada abad 21. (Dewan Keamanan) harus representatif, legitimate dan efektif. Bahwa penambahan anggota tetap dan tidak tetap termasuk dengan memperhatikan perwakilan negara maju dan negara Berkembang harus dilakukan. 4) Brazil, Jerman, India dan Jepang yang telah mengajukan diri untuk menjadi kandidat resmi anggota tetap dalam perluasan anggota Dewan Keamanan mendukung pencalonan negara lain. Afrika harus diwakili di anggota tetap Dewan Keamanan, dimana kami akan bekerjasama untuk merealisasikan reformasi yang berarti di Dewan Keamanan. (www.mofa.go.jp/policy/un/reform/joint0409.html .)

Pada 22 Juni 2005 bertempat di Brussels serta ditandatangani oleh keempat Menteri Luar Negeri Jepang, Jerman, India dan Brazil, keempat negara yang tergabung di G4 ini mengeluarkan pernyataan bersama yang isinya: 1) bahwa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat PBB dalam mengefektifkan tantangan saat ini, dan perlunya reformasi PBB yang komprehensif, termasuk pembangunan, keamanan dan hak azasi manusia. 2) Bahwa Dewan Keamanan harus direformasi untuk mewakili realitas global saat ini, dan bukan (mewakili) dunia 60 tahun yang lalu. Untuk itu Dewan Keamanan baik anggota tetap maupun tidak tetap harus diperluas dengan perwakilan yang seimbang termasuk antara negara maju dan negara Berkembang. (www.mofa.go.jp/policy/un/reform/joint0506.html)

Meski pada tahun 2006 Jepang sempat hampir menarik diri dari G4 karena tidak sepakat dengan ketiga anggota lainnya, namun dalam pertemuan terakhir mereka pada bulan September 2012, Jepang beserta ketiga negara lainnya tersebut kembali menunjukkan kekompakannya. Pada tanggal 25 September 2012, di sela pembukaan Sidang ke-67 Majelis Umum PBB, Menteri Hubungan Eksternal Brasil, Menteri Federal untuk Luar Negeri Jerman , Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Luar Negeri India bertemu di New York kembali bertemu untuk bertukar pandangan mengenai reformasi Dewan Keamanan. Keempat negara menyatakan Joint Declaration sebagaimana termuat dalam situs Kementrian Luar Negeri Jepang , MOFA

(Ministry of Foreign Affairs) dengan judul Ministerial Meeting of the G4 Countries (Brazil, Germany, India and Japan) in the margins of the 67th of the UN General Assembly Joint Press Statement, New York, 25 September 2012. (www.mofa.go.jp/policy/un/pko/joint_1209.html)

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan bersama mereka sebelumnya, para Menteri menegaskan kembali visi mereka tentang reformasi Dewan Keamanan, dengan mempertimbangkan kontribusi yang diberikan oleh negara untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan tujuan organisasi lainnya, serta kebutuhan untuk meningkatkan representasi negara-negara berkembang di kedua kategori, yang menurut pandangan mereka agar lebih mencerminkan realitas geopolitik saat ini. Negara-negara G4 menegaskan komitmen mereka sebagai calon anggota tetap baru Dewan Keamanan PBB, serta dukungan mereka untuk pencalonan masing-masing. Mereka juga menegaskan kembali pandangan mereka tentang pentingnya Afrika untuk diwakili dalam keanggotaan permanen dari Dewan diperbesar. Untuk itu G4 memperluas konsepnya yang dikenal G4+1, dimana 1 anggota yang diajak bergabung memperjuangkan reformasi adalah Ghana untuk mewakili kawasan Afrika.

Upaya terus menerus dilakukan Jepang. Pernyataan bersama G4 yang dikeluarkan 7 November 2013 Dalam teks yang diberi judul "Joint Statement by Brazil, Germany, India and Japan" yang disampaikan oleh Wakil Tetap Jepang di PBB, Motohide Yoshikawa, yang disampaikan dalam Joint Debate sesi 68 Majelis Umum, pada Agenda Item 123 dengan tema "The Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council and Related Matters" dan Item 29: Report of the Security Council, Yoshikawa antara lain menyatakan :

"our side, in response to your call in the letter of 6 November, the G4 countries are ready to take part in "collective actions", in order to search common ground on the issue of Security Council reform. We stand ready to actively contribute to this process in a spirit of flexibility. We also encourage others to show the same spirit of compromise

required to engage in a negotiation process that deserves to be called so in content and not in name only. Objection to text-based negotiations not only runs counter to the spirit of the Outcome Document, but also the basic logic of multilateral diplomacy. Let us strive together to fulfill the outstanding task and prove that a reform of the UN Security Council is possible." (<http://www.un.emb-japan.go.jp/statements/yoshikawa110713.html>.)

Dari pernyataan tersebut, tampak konsistensi keempat negara yang tergabung dalam G4 yang mengingatkan kembali PBB melalui Majelis Umum terhadap upaya reformasi yang sudah diwacanakan sejak tahun 2005, dan bahwa reformasi dalam tubuh PBB bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Bagaimana Peluang Jepang ?

Dari uraian diatas, tampak Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan impiannya tersebut, namun demikian Jepang harus menghadapi berbagai kenyataan berikut. *Pertama*, Usulan terhadap Reformasi PBB sudah muncul sejak tahun 1992, namun sampai dengan akhir tahun 2013, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil. Terhadap Reformasi Dewan Keamanan, setidaknya ada 3 isu sentral, yakni menyangkut : 1) keanggotaan; 2) transparansi; dan 3) hak veto. Terhadap usulan Reformasi ini, mantan Sekjen PBB Kofi Annan dalam Proposal yang berjudul *In Larger Freedom* 31 Maret 2005 mengajukan 2 opsi yang dikenal dengan Plan A dan Plan B. Plan A berisi usulan untuk menambah 6 anggota Tetap baru dan 3 anggota Tidak Tetap, sehingga total jumlah anggota Dewan Keamanan akan menjadi 24 dari semula 15 anggota. Sementara Plan B menawarkan penambahan 8 anggota baru dalam klasifikasi keanggotaan yang baru. 8 anggota bertugas 4 tahun dan bisa diperpanjang, ditambah 1 anggota tidak tetap, sehingga total anggota juga 24. Untuk soal inipun masih belum ada kesepakatan.

Namun demikian, upaya intensif untuk melakukan reformasi sebetulnya terus diupayakan, antara lain tampak dari dibentuknya kelompok kerja reformasi pada tahun 1993. Sekjen PBB waktu itu, Kofi Annan juga pernah memperingatkan kurangnya reformasi dapat

melemahkan kedudukan dewan di dunia. Upaya intensif juga tampak dari kembali diadakannya diskusi antar pemerintah yang diwakili para Menteri untuk membahas kemajuan reformasi Dewan Keamanan pada tahun 2012. Dalam pertemuan ini, para Menteri berbagi penilaian bahwa mayoritas negara-negara anggota menyuarakan dukungan untuk perluasan Dewan Keamanan, baik keanggotaan Tetap maupun Tidak Tetap. Untuk tujuan tersebut, para Menteri membuat penilaian yang kemudian diajukan dalam surat yang ditanda tangani oleh Ketua perundingan antar pemerintah, Duta Besar Zahir Tanin, tertanggal 25 Juli 2012 kepada Presiden Majelis Umum. Surat tersebut membuat rekomendasi para Menteri yang menyatakan pandangan dukungan yang kuat untuk ekspansi di kedua kategori harus tercermin dalam proses negosiasi antara negara anggota dan menyerukan penyusunan dokumen kerja singkat sebagai dasar untuk negosiasi lebih lanjut, sejalan dengan rekomendasi dari Ketua .

Para Menteri menyambut baik keputusan Majelis Umum untuk segera melanjutkan proses negosiasi antar pemerintah dalam pleno informal Sidang ke-67. Mereka menyatakan komitmen kuat untuk meningkatkan kerjasama yang fleksibel dan menekankan perlunya tekad mereka untuk membuat momentum politik yang lebih besar dalam proses reformasi, termasuk dengan maksud untuk penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi tentang reformasi Dewan Keamanan , seperti juga dianjurkan oleh Ketua dalam suratnya yang diedarkan oleh Presiden sesi ke-66 Majelis Umum PBB kepada negara-negara anggota pada tanggal 27 Juli 2012. Namun demikian, sampai saat ini, upaya tersebut masih belum mencapai kesepakatan yang lebih detail, terutama menyangkut penambahan kursi anggota tetap Dewan Keamanan.

Kedua, meski Jepang telah berupaya mendapat dukungan dari China, namun tidak adanya dukungan dari China yang merupakan negara tetangga Jepang sekaligus satu-satunya negara Asia yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. China bahkan cenderung menentang upaya Jepang tersebut. Pendekatan melalui upaya dialog telah dilakukan Jepang pada 26 Desember 2005 di Beijing dengan konsultasi yang diwakili oleh deputi Menteri Luar Negeri

Jepang, Masaharu Kono, sedang China diwakili oleh Asisten Menteri Luar Negerinya, Shen Guofang. (www.chinaembassy.org.in/eng/zgbd/t228256.html.)

Penolakan tampak dari pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Qiao Zonghuai sehari sesudah pertemuan tersebut dengan menegaskan posisi China di PBB, yang lebih mendukung perwakilan dari negara Berkembang terutama dari negara di Afrika (daripada mendukung Jepang yang notabene merupakan negara maju), apabila Dewan Keamanan akan direformasi dengan menambah kursi anggota tetap. Qiao menyatakan “priority (of the reform) should be given to increasing the representation of developing countries especially African Countries.” (www.chinaembassy.org.in/eng/zgbd/t228256.html).

Ketidaksetujuan China ini bahkan dipertegas dengan sikapnya yang akan menjegal Jepang yang berupaya mengajukan *voting* untuk mengatasi ketidaksepakatan dalam Majelis Umum untuk masalah reformasi PBB. Hal ini sebagaimana ditegaskan Qiao, “China opposes voting of any reform plan over which there is a large amount of disagreement between UN members”. (www.china.org.cn/english/2005/Dec/153276.html). Penegasan China ini disampaikan untuk mengantisipasi kemungkinan Jepang dengan G4nya menggunakan opsi voting untuk merealisasikan keinginannya. Sikap China ini antara lain didasari dihentikannya upaya Jepang (G4) untuk mengagendakan proposal mereka pada salah satu sesi sidang Majelis Umum pada bulan September 2006, setelah mereka gagal mendapat dukungan yang memadai.

Menanggapi pernyataan China itu, Jepang berupaya meyakinkan bahwa opsi voting untuk merealisasikan keinginannya adalah suatu hal yang wajar dan masuk akal. Hal ini didasarkan pada : *pertama*, pernyataan Sekjen PBB Kofi Annan dalam laporannya, bahwa reformasi dalam PBB tidak akan lengkap tanpa reformasi Dewan Keamanan, dan agar kesepakatan dibuat sebelum pertemuan bulan September, dan kesepakatan adalah opsi yang paling baik, namun apabila kesepakatan tidak tercapai, maka hal ini hendaknya tidak menjadi alasan untuk menundanya. (www.mofa.go.jp/announce/speech/un2005/un0504-7.html). Dengan kata lain, secara implisit dapat dikatakan bahwa reformasi PBB,

termasuk di Dewan Keamanan adalah suatu keharusan dan harus segera dilakukan. Jepang mendukung pandangan Annan ini dengan menyatakan pandangan tersebut sebagai absah, realistis dan wajar. *Kedua*, opsi *voting* apabila tidak terdapat kesepakatan adalah absah, hal ini berdasar pada Artikel 108 Piagam (PBB) dan Resolusi 53/30 tahun 1998 Majelis Umum.

Selain argumen absahnya *voting* dalam pengambilan suara jika mengalami deadlock, Jepang juga mengingatkan bahwa perluasan anggota tetap Dewan Keamanan dari 6 menjadi 10 pada tahun 1963 diambil berdasar *voting* dan bukan melalui konsensus. Seandainya konsensus yang digunakan, anggota Dewan saat ini pasti akan tetap 11, dan bukan 15.¹ (www.mofa.go.jp/announce/speech/un2005/un0504-7.html)

Ketiga, Penolakan terhadap pencalonan Jepang juga tampak dari sikap Korea Utara yang menyatakan menentang keras pencalonan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Menurut Pemerintah Korea Utara :

“Japan has no qualification to be a permanent member of the UN Security Council in all respects, describing Japan behavior to make desperate efforts for the Security Council membership as “impudent and imprudent”. This issue can not be solved by money or backing of big countries but by the recognition of the international community”. (http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176690.html)

Eratnya hubungan Jepang dan Amerika Serikat, yang notabene ‘musuh’ Korea Utara, semakin memperkuat penolakan Korea Utara terhadap pencalonan Jepang tersebut. Korea Utara menganggap bahwa jika Jepang menjadi anggota tetap di Dewan Keamanan, maka sama halnya dengan menambah satu suara bagi Amerika Serikat. Menurut DPRK, “ if Japan, a servant following the United States, becomes a permanent member of the UNSC, it will only result in adding one vote to the US in harassing world security and international order”.

Selain penolakan dari kedua negara tetangga tersebut, negara tetangga Jepang yang lain, Korea Selatan, juga menyatakan penokannya dengan bergabungnya Korea Selatan (dan Cina) dalam *Uniting for Consensus* yang secara tegas menyatakan penolakan penambahan kursi di

Dewan Keamanan PBB. Berikut penjelasannya. *Keempat*, bergabungnya , 50 negara dalam *Uniting for Consensus* (dijuluki Coffee club) dapat dikatakan sebagai kontra terhadap G4, termasuk didalamnya G4+1. (http://en.wikipedia.org/wiki/Uniting_for_Consensus) Kelompok yang dipimpin Italia, Pakistan, Argentina, Meksiko dan beranggotakan antara lain Pakistan, China, Korea Selatan, Pakistan Costa Rica dan Turki, ini menentang keras penambahan kursi di Dewan Keamanan PBB karena dianggap akan semakin memperburuk disparitas antar anggota. *Uniting for Consensus* menyatakan akan tetap mempertahankan keanggotaan 5 anggota Tidak Tetap, sebagaimana adanya, dan menawarkan penambahan anggota Tidak tetap sebanyak 10 kursi, sehingga total menjadi 20 kursi. Hal ini mudah dipahami mengingat negara-negara yang tergabung dalam *Uniting for Consensus* tersebut adalah negara negara yang sebagian ‘berseberangan’ dengan anggota G4. Pakistan, misalnya jelas tidak akan rela jika India menjadi Anggota Tetap Dewan keamanan PBB, demikian juga dengan Argentina, jelas akan menentang pencalonan Brazil, dengan alasan meski Brazil merupakan negara terbesar di kawasan Amerika Selatan, namun dianggap tidak mewakili kawasan tersebut, karena Brazil berbahasa resmi Portugis. Italia dan Spanyol juga menolak keras pencalonan Jerman karena Jerman yang merupakan kekuatan ekonomi Eropa akan menjadi negara yang makin kuat posisi tawarnya.

Simpulan

Dari uraian diatas tampak bahwa alasan Jepang untuk menjadi anggota Tetap Dewan Keamanan PBB sebenarnya merupakan hal yang masuk akal mengingat kontribusi Jepang yang besar dalam organisasi internasional tersebut. Demikian pula, Jepang juga sudah melakukan berbagai upaya yang relatif strategis dan tepat untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Namun demikian Jepang harus bersikap realistis menghadapi kenyataan bahwa keinginannya tersebut akan sulit dicapai dalam beberapa tahun mendatang, dan bahkan mungkin keinginan tersebut hanya akan menjadi angan angan belaka. Hal ini mengingat semakin banyaknya tentangan terhadap penambahan kursi di Dewan Keamanan, terutama Anggota Tidak Tetap, meski sebagian

besar Negara anggota juga mengakui bahwa reformasi perlu dilakukan oleh PBB. Demikian pula, meski berbagai upaya kearah Reformasi sudah dirintis sejak tahun 2005, namun sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Referensi:

China Through A Lens, China: Developing Nations Should Be Priority of the UN Reform, www.china.org.cn/english/2005/Dec/153276.html

“DPRK: Japan has no Qualification for Permanent Member of UNSC”, *People’s Daily online*, updated March 14, 2005, http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176690.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniting_for_Consensus

“World Development Indicators”, *World Bank*, 2000.

Joint Statement by Brazil, Germany, India and Japan, <http://www.un.emb-japan.go.jp/statements/yoshikawa110713.html>.

Ministerial Meeting of the G4 Countries (Brazil, Germany, India and Japan) in the margins of the 67th of the UN General Assembly Joint Press Statement, New York, 25 September 2012 http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/joint_1209.html.

Ministry of Foreign Affairs of Japan, “An Argument for Japan’s Becoming Permanent Member”, <http://www.mofa.go.jp/policy/un/japan.html>

Secretary General Office of the Spokesman, “Tokyo, Japan, 24 February 2004-The Secretary General’s Address to the Japanese Parliament,” www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=789.

The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “A Statement by H.E Mr Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan At The Meeting of the General Assembly on Item 11: Report of the Security Council and Item 53: Question of Equitable Representation on and Increase in the Membership of the Security Council and Related Matters”, 11 October 2004, www.mofa.go.jp/announce/speech/un2004/un0410-5.html.

The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “G4 London Declaration”, www.mofa.go.jp/policy/un/reform/press0507.html.

The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Meeting of the Leaders of Brazil, Germany, India, and Japan on UN Reform Joint Press Statement,” www.mofa.go.jp/policy/un/reform/joint0409.html.

The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Joint Statement Concerning Cooperation Among Federative Republic of Brazil, Federal Republic of Germany,

India and Japan on United Nations Reform,” www.mofa.go.jp/policy/un/reform/joint0506.html.

The Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Consultations Between Japan and China Concerning UN Reform*, www.mofa.go.jp/announce/event/2005/12/1222.html.

Embassy of the PRC’s in India, China, Japan discuss UN Reform(2005/12/27), www.chinaembassy.org.in/eng/zgbd/t228256.html, hal 1, diakses 15 September 2006

The Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Statement by H.E Ambassador Kenzo Oshima: Permanent Representative of Japan to the United Nations At The Informal Thematic Consultation of the General Assembly On Cluster IV (The Imperative for Collective Action: Strengthening the United Nations)*, www.mofa.go.jp/announce/speech/un2005/un0504-7.html.

(Endnotes)